Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 2 2026, hal 1026-1034
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

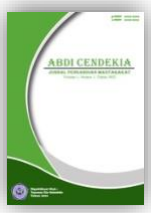

ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Halaman 1026-1034
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Polarisasi Sosial Era Digital: Peran *Buzzer* Politik dalam Merusak Hubungan Antarkelompok

Fauza Syahiban[1], Awi Febrian[2], Nadira Syifa Qanita[3], Ipan Stumetru Tanjung[4], Naila Annisa Siregar[5], Bisru Hafi[6]
[1,2,3,4,5,6] Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Email : fauzasyahiban@gmail.com[1]; awifebrian361@gmail.com[2]; nadira.syifa0301@gmail.com[3]; ipanstanjung@gmail.com[4]; annisanaila825@gmail.com[5]; bisru.hafi@usu.ac.id[6]

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi fenomena *buzzer* politik sebagai aktor utama dalam merekayasa wacana publik dan dampaknya terhadap kohesi masyarakat majemuk. Masih terbatas studi yang menaruh perhatian pada mekanisme sosiologis spesifik tentang bagaimana narasi yang direkayasa oleh *buzzer* merusak hubungan antarkelompok di tingkat akar rumput di luar masa pemilihan umum. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menyintesis mekanisme operasional *buzzer* politik dan menganalisis implikasi sosiologisnya terhadap kohesi komunal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membedah strategi operasional *buzzer* dan menganalisis implikasinya terhadap polarisasi sosial menggunakan kerangka Teori Identitas Sosial.Melalui metodologi tinjauan pustaka sistematis terhadap sumber-sumber akademik kontemporer, studi ini menemukan bahwa strategi manipulasi algoritmik dan disinformasi berbasis sentimen primordial sengaja dieksploitasi untuk memicu permusuhan antara kelompok pro dan kontra. Temuan utama mengonfirmasi bahwa intervensi destruktif ini tidak hanya mengikis spektrum moderat dalam opini publik, tetapi juga secara fatal mengoyak ikatan rasa saling percaya lintas komunitas di dunia nyata. Kesimpulan membuktikan bahwa *buzzer* politik merupakan ancaman langsung terhadap integritas demokrasi dan ketahanan sosial. Kebaruan artikel ini terletak pada sintesis sosiologisnya yang memetakan transmisi konflik dari ruang gema digital (*digital echo chambers*) menjadi gesekan di dunia nyata. Direkomendasikan untuk mengintegrasikan kurikulum literasi digital yang terstruktur dan mereformasi tata kelola platform media sosial guna melindungi masyarakat dari segregasi budaya yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Buzzer Politik, Kohesi Sosial, Media Digital, Polarisasi Sosial, Teori Identitas Sosial.*

Digital Era Social Polarization: The Role of Political Buzzers in Damaging Intergroup Relations

Abstract

This study explores the phenomenon of political buzzers as main actors in engineering public discourse and its impact on the cohesion of a pluralistic society. There have been limited studies concerned on the specific sociological mechanisms of how buzzer-engineered narratives degrade intergroup relations at the grassroots level outside election periods. Therefore, this research intends to synthesize the operational mechanisms of political buzzers and analyze their sociological implications on communal cohesion. The objectives of

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

this research are to dissect buzzer operational strategies and analyze their implications for social polarization using the Social Identity Theory framework. Through a systematic literature review methodology of contemporary academic sources, this study finds that algorithmic manipulation strategies and primordial sentiment-based disinformation are deliberately exploited to trigger hostility between pro and contra groups. The main findings confirm that this destructive intervention not only erodes the moderate spectrum in public opinion but also fatally tears the bonds of cross-community mutual trust in the real world. The conclusion proves that political buzzers are a direct threat to democratic integrity and social resilience. This article's novelty lies in its sociological synthesis mapping the conflict transmission from digital echo chambers to real-life friction. It is recommended to integrate structured digital literacy curricula and reform social media platform governance to protect society from continuous cultural segregation.

Keywords: *Political Buzzer, Social Cohesion, Digital Media, Social Polarization, Social Identity Theory.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang masif selama dekade terakhir telah mengubah lanskap interaksi sosial secara mendasar, menciptakan pergeseran paradigma tentang bagaimana komunikasi manusia disusun, didistribusikan, dan dikonsumsi. Komunikasi dan pertukaran informasi, yang sebelumnya bergantung pada interaksi tatap muka langsung atau penjaga gawang (*gatekeepers*) media massa konvensional, telah secara dramatis bermigrasi ke platform digital. Besarnya transisi ini secara eksplisit terlihat dari penggunaan internet masif yang mencakup mayoritas populasi. Data otoritatif terbaru mengungkapkan bahwa dari 276,4 juta populasi Indonesia, 212,9 juta adalah pengguna internet aktif (penetrasi 77%), menghabiskan rata-rata 7 jam dan 38 menit setiap hari secara online, dengan lebih dari 3 jam didedikasikan khusus untuk platform media sosial (Riyanto, 2024). Secara teoretis, ruang siber awalnya diidealkan untuk memfasilitasi ruang publik yang egaliter dengan partisipasi setara, kebebasan berekspresi tanpa hambatan, dan wacana rasional tanpa dominasi (Akbar, 2020). Namun, realitas empiris interaksi *online* menunjukkan bahwa ruang siber telah berkembang pesat menjadi arena yang sangat fluktuatif, sangat rentan terhadap manipulasi informasi, rekayasa opini publik, dan pembuatan persetujuan (*manufacturing of consent*) secara sistematis (Sarjito, 2024; Setiawan et al., 2022). Fenomena yang berkembang ini sangat terkait dengan Sosiologi Masyarakat Virtual, sebuah sub-disiplin yang mewakili pergeseran inti dalam cara komunitas modern beroperasi dan mempertahankan integrasi mereka.

Pada titik kritis kerentanan digital ini, kelas aktor siber baru yang secara sistematis memanipulasi arus informasi telah muncul, yang populer diidentifikasi di Indonesia sebagai "buzzer". Etimologi istilah 'buzzer' berasal dari praktik pemasaran komersial, khususnya *buzz marketing*, yang digunakan untuk mempromosikan kesadaran produk atau keterlibatan merek secara organik (Mustika, 2019). Namun, dalam konteks ekonomi politik media, keberadaan *buzzer* telah berevolusi secara drastis menjadi instrumen komunikasi politik yang terorganisir dan terindustrialisasi, didanai oleh modal besar dan beroperasi sepenuhnya di bawah radar transparansi dan akuntabilitas. Kehadiran mereka secara artifisial telah mengubah wacana publik organik menjadi wacana yang direkayasa, jenuh dengan kampanye negatif, pembunuhan karakter, dan hoaks (Trianto, 2020). Dari perspektif determinisme teknologi yang dicetuskan oleh Marshall McLuhan dan konsep pembusukan politik (*political decay*) oleh Francis Fukuyama, proliferasi tak terkendali dari para *buzzer* ini mengindikasikan kemerosotan komunikasi politik, di mana ruang digital demokratis dibajak oleh para oportunis politik, mengakibatkan membusuknya kepercayaan publik.

Sebagian besar penelitian sebelumnya memfokuskan pada peran fungsional *buzzer* dalam memengaruhi elektabilitas kandidat, metrik pemasaran digital, atau mendistorsi sistem

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

politik secara eksklusif selama pemilihan umum (David, 2017; Yulianto, 2023). Namun, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam literatur sosiologi digital, yaitu kurangnya studi multidisiplin yang komprehensif yang membedah bagaimana narasi yang direkayasa oleh *buzzer* politik secara spesifik berdampak pada degradasi hubungan antarkelompok dan merusak kohesi sosial masyarakat majemuk secara tak terparahkan hingga ke tingkat akar rumput, mencakup periode krisis elektoral maupun non-elektoral (Hasrul et al., 2025; Arianto, 2020).

Untuk mengatasi masalah kritis ini, penelitian ini dibangun di atas beberapa kerangka teoretis yang kuat. Pertama, konseptualisasi sosiologis tentang Kohesi Sosial. Berdasarkan pembedaan solidaritas Emile Durkheim dan teori modal sosial Robert Putnam, kohesi sosial sejati sangat bergantung pada modal sosial yang menjembatani (*bridging social capital*), yaitu jaringan inklusif yang menghubungkan kelompok-kelompok heterogen melintasi perbedaan sosial-budaya. Kedua, Konsep Ruang Gema, Gelembung Filter, dan Polarisasi Kelompok. Secara inheren, algoritma media sosial dirancang secara komersial untuk memaksimalkan retensi pengguna dengan menyajikan konten yang dikurasi yang memvalidasi keyakinan awal pengguna (Pariser, 2011). Dalam gelembung algoritmik ini, keragaman opini secara sistematis dikurangi, menciptakan isolasi sosial dan informasi yang mempercepat polarisasi kelompok, mendorong individu ke arah sudut pandang yang lebih ekstrem sambil membuat mereka kebal terhadap argumen rasional yang kontradiktif.

Ketiga, Teori Identitas Sosial dasar yang dirumuskan oleh Henri Tajfel dan John Turner. Teori psikologis-sosiologis ini mengemukakan bahwa individu mendefinisikan eksistensi dan harga diri mereka tidak hanya berdasarkan atribut pribadi, tetapi juga sangat ditentukan oleh afiliasi kelompok sosial (Tajfel & Turner, 1986). Dalam pengaturan digital kontemporer, kategorisasi menjadi "kita" (*in-group*) dan "mereka" (*out-group*) ini berakselerasi dengan cepat. Hal ini secara alami memicu bias favoritisme *in-group* yang parah dan diskriminasi *out-group* yang agresif, yang sering kali mengarah pada Kesalahan Atribusi Ekstrem di mana tindakan negatif kelompok luar dipandang sebagai kelemahan karakter yang melekat. Kerangka penelitian secara logis menghubungkan intervensi algoritmik dari aktor *buzzer* politik sebagai variabel stimulus manipulatif yang menjadikan bias kognitif ini sebagai senjata. Dengan mengeksploitasi ruang gema, *buzzer* memicu kebangkitan mekanisme pertahanan identitas sosial primitif, yang berpuncak pada polarisasi afektif yang parah dan hilangnya kohesi komunal yang membawa bencana.

Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyintesis mekanisme kerja *buzzer* politik yang sangat canggih, melacak evolusi mereka sebagai industri ekonomi politik bawah tanah, dan menganalisis secara komprehensif implikasi sosiologis mereka yang merusak pada hubungan antarkelompok dan kohesi sosial di Indonesia.

METODE

Metode penelitian ini menjelaskan tahapan ketat penelitian yang dilakukan untuk mencapai tujuan teoretis dari studi ini. Penelitian ini dikonstruksikan menggunakan pendekatan Tinjauan Pustaka Sistematis (SLR). Pemilihan metodologi khusus ini pada dasarnya didasarkan pada kompleksitas fenomena *buzzer*, yang sifatnya sangat interdisipliner, membutuhkan sintesis rumit dari berbagai domain keilmuan seperti sosiologi, psikologi sosial, ilmu politik, hukum siber, dan ilmu komunikasi (Estyani Cahya & Nasiwan, 2024). Variabel utama yang dianalisis secara komprehensif meliputi mekanisme operasional, struktur ekonomi, dan strategi komunikasi *buzzer* politik sebagai variabel independen, serta dampaknya yang mendalam terhadap hubungan antarkelompok, polarisasi afektif, dan kohesi sosial sebagai variabel dependen. Data secara eksklusif berasal dari artikel jurnal akademik yang ditelaah sejawat, makalah kebijakan institusional, dan rilis resmi pemerintah yang dikumpulkan melalui basis data akademik terkemuka termasuk Google Scholar, DOAJ, ResearchGate, dan repositori institusi pendidikan nasional (SINTA). Teknik pengumpulan data secara teliti difokuskan pada literatur yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir untuk menangkap dinamika digital terkini, menggunakan kata kunci pencarian seperti

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

"buzzer politik", "polarisasi sosial", "hubungan antarkelompok", "teori identitas sosial", "kohesi sosial", dan "mitigasi literasi digital" (Senora, 2025; Sari et al., 2025).

Untuk memperkaya sintesis secara signifikan, studi ini secara mendalam meninjau berbagai variasi metodologis lanjutan yang digunakan oleh para peneliti sebelumnya. Sebagian besar literatur sumber menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis bingkai (seperti model Robert N. Entman) untuk mengungkap bagaimana narasi provokatif disusun secara kognitif. Secara krusial, tinjauan ini juga menggabungkan studi yang menerapkan metode campuran dengan instrumen Analitik Jaringan Sosial (SNA) (misalnya, Netlytic) untuk memetakan jaringan tersembunyi yang terstruktur dan penyebaran tagar dari aktor *buzzer* di platform digital secara empiris. Selain itu, beberapa studi empiris primer memperluas alat analisis mereka dengan kerangka PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi), di samping pengumpulan data primer melalui wawancara kualitatif mendalam dengan warganet yang bertindak sebagai pembuat opini aktif di ranah digital. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sintesis tematik kualitatif. Semua literatur primer dan sekunder dibaca secara ekstensif, diberi kode, dan dianalisis secara kritis, diikuti oleh triangulasi konseptual yang ketat untuk mengekstraksi kesimpulan yang kuat dan objektif mengenai pola operasionalisasi *buzzer* dan dampaknya yang beragam (Indranata & Alhamdi, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Politik Media dan Pelembagaan *Buzzer*

Berdasarkan tinjauan pustaka yang mendalam, *buzzer* telah sepenuhnya bertransformasi dari pengguna internet individu yang tidak terorganisir menjadi industri bayangan bawah tanah yang sangat terlembaga dan beroperasi dengan ketepatan tingkat perusahaan. Dari perspektif ekonomi politik media, fenomena ini menyoroti komodifikasi perhatian publik yang agresif, di mana wacana publik diperdagangkan sebagai komoditas transaksional bagi para elite politik. Secara historis, dominasi operasi rekayasa opini ini dimulai di Twitter (sekarang X) sekitar tahun 2009, awalnya digunakan untuk gerakan sosial organik (seperti kampanye #indonesiaunite), sebelum dibajak dan dimonetisasi oleh kelompok oportunis politik. Keberhasilan industri ini bergantung pada arsitektur komunikasi yang komprehensif, didanai dengan baik, dan terukur. Secara organisasi, ekosistem *buzzer* kontemporer terstruktur ke dalam tiga divisi yang sangat terspesialisasi: analisis tren, pembuatan konten, dan amplifikasi (Trianto, 2020). Divisi analitik menggunakan alat pendengar media sosial yang canggih untuk memanen percakapan warganet, memahami sentimen publik, dan menentukan titik-titik kerentanan sosial-budaya. Setelah pemetaan psikologis selesai, divisi konten memproduksi narasi yang sangat tertarget secara massal. Patut dicatat, *buzzer* politik jarang menggunakan kampanye positif yang membutuhkan logika substantif atau bukti empiris; sebaliknya, mereka secara masif mengeksploitasi kampanye negatif, pembunuhan karakter, fitnah, dan disinformasi untuk mendelegitimasi tokoh-tokoh lawan (Mustika, 2019).

Studi sosiologis mencatat pergeseran teoretis yang mendalam dalam paradigma komunikasi politik. Konsep konvensional tentang pemimpin opini otentik (seperti yang dijelaskan dalam teori Arus Komunikasi Dua Tahap) terus digantikan oleh pembuat opini yang terdesentralisasi, artifisial, dan sering kali anonim yang beroperasi di balik profil hasil kloning. Lebih jauh lagi, memasuki siklus kontestasi politik baru-baru ini seperti Pemilu 2024, taktik operasional mereka telah bergeser secara signifikan ke platform yang berpusat pada visual seperti TikTok. Di sini, *buzzer* memanipulasi algoritma FYP (*For You Page*) dengan menyebarkan video pendek rekayasa (*deepfake/cheapfake*) yang dirancang khusus untuk memotong pemikiran kritis dan menargetkan kerentanan kognitif pemilih muda pemula.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Tabel 1. merangkum perbedaan paradigma mendasar yang memisahkan praktik komersial organik dari praktik destruktif *buzzer* politik, yang berfungsi sebagai fondasi untuk menganalisis kerusakan kohesi sosial selanjutnya.

Aspek Observasi	Buzzer Komersial	Buzzer Politik (Destruktif)
Orientasi Tujuan	Meningkatkan kesadaran merek, komersialisasi produk, dan penjualan	Rekayasa opini, polarisasi afektif, delegitimasi oposisi, retensi kekuasaan
Instrumen Narasi	Testimoni kualitas, video *unboxing*, ulasan pengalaman pelanggan	Ujaran kebencian, kampanye hitam, *doxing*, hoaks identitas primordial (SARA)
Metode Operasional	*Endorsement influencer*, afiliasi transparan (sebagian besar)	*Astroturfing*, pengerahan pasukan *bot*, akun kloning anonim
Dampak Sosiologis	Manipulasi preferensi konsumen dan komodifikasi produk	Degradasi keadilan elektoral, represi kebebasan sipil, ancaman disintegrasi komunal

Amplifikasi Algoritmik, Gelembung Filter, dan Spiral Keheningan

Fase krusial dari operasi ini adalah amplifikasi, yang secara tegas membedakan operasi *buzzer* dari hubungan masyarakat biasa. Proses ini mendistribusikan konten secara otomatis menggunakan pasukan masif akun bot dan profil palsu. Taktik andalan dalam metode ini adalah *astroturfing*, yaitu pemompaan tagar spesifik secara terkoordinasi dan bersamaan untuk mensimulasikan dukungan akar rumput buatan (Mustika, 2019). Bukti empiris dari pengujian SNA menemukan bukti konkret dari rekayasa ini: satu agenda kampanye dapat menampilkan ribuan akun kloning yang dibuat secara bersamaan, secara eksklusif diprogram untuk memompa tagar politik hingga mendominasi topik tren nasional. Penciptaan "kebisingan" digital ini menciptakan keadaan hiperrealitas, sebuah konsep yang selaras dengan teori simulasi Jean Baudrillard, di mana tren artifisial yang diorkestrasi oleh *buzzer* dipersepsikan oleh publik sebagai realitas absolut, secara efektif menyeret audiens ke dalam permainan manipulatif mereka. Skala kebisingan ini mengejutkan; laporan resmi telah mengindikasikan bahwa sekitar 92% dari total kebisingan digital selama periode elektoral dihasilkan secara artifisial oleh *buzzer*, sepenuhnya menenggelamkan wacana warga yang asli. Kecepatan eskalasi polarisasi ini difasilitasi oleh algoritma media sosial yang pada dasarnya cacat. Temuan literatur membuktikan bahwa informasi palsu yang disensasionalkan (hoaks) dapat menyebar hingga enam kali lebih cepat daripada berita faktual, terutama pada platform seperti Twitter, karena konten provokatif yang bermuatan emosional memicu reaksi manusia secara instan dan memaksimalkan metrik keterlibatan platform.

Dampak sosiologis yang nyata adalah penghancuran ranah moderat dan sentris secara sistematis. Kelompok demografis mayoritas, yang pada awalnya moderat, diintimidasi untuk mengadopsi "spiral keheningan". Ketika mereka menyaksikan pengeroyokan siber dan *doxing* yang dilakukan oleh *buzzer* terhadap siapa pun yang menawarkan narasi tandingan, warga moderat memilih untuk sepenuhnya menarik diri dalam keputusasaan dan ketakutan (Akbar, 2020). Sebuah ilustrasi kontemporer dari represi ini terjadi pada Agustus 2024. Ketika masyarakat sipil dan akademisi menginisiasi gerakan konstitusional "Peringatan Darurat", ekosistem *buzzer* dimobilisasi secara terpusat untuk membanjiri internet dengan narasi tandingan artifisial "Indonesia Baik-Baik Saja". Ini adalah taktik yang disengaja untuk memecah belah solidaritas massa, menenggelamkan kritik hukum yang sah, dan menindas kebebasan akademik secara brutal.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Teori Identitas Sosial dan Akselerasi Polarisasi Afektif

Intervensi mesin propaganda *buzzer* bertindak sebagai katalisator langsung untuk polarisasi afektif, yaitu perpecahan emosional yang mendalam di masyarakat. Penjelasannya terletak pada keputusan strategis *buzzer* untuk menyuntikkan informasi yang dirancang secara spesifik untuk menekan insting pertahanan psikologis manusia purba: ketakutan, ancaman yang dirasakan terhadap identitas, dan kemarahan kesukuan. Komunikasi digital yang tidak etis, sama sekali tidak memiliki nilai-nilai komunikatif seperti kejujuran, kerendahan hati, dan kasih sayang, memperburuk perpecahan ini. Ketika disinformasi dikemas secara cermat menggunakan sentimen identitas primordial, khususnya SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), kontestasi politik secara berbahaya diubah menjadi wacana eksistensial. Perbedaan afiliasi politik tidak lagi dipandang semata-mata sebagai ketidaksepakatan kebijakan, melainkan dibingkai sebagai ancaman ontologis terhadap kelangsungan hidup suatu kelompok (Rahmawati & Neviyarni, 2024). Berdasarkan Teori Identitas Sosial, pergeseran isu ini dengan keras memaksa individu untuk bereaksi melalui dorongan komunal yang secara refleks menebalkan kesetiaan absolut pada kelompok sendiri (*in-group*) sekaligus melegitimasi agresi verbal yang ekstrem, dan terkadang fisik, terhadap kelompok luar (*out-group*) (Tajfel & Turner, 1986). Dinamika psikologis ini menemukan tempat berkembang biak yang sempurna dan tanpa hambatan di dalam gelembung filter media sosial. Algoritma ini menciptakan kantong isolasi yang kedap udara (ruang gema) di mana audiens melihat narasi kebencian bukan sebagai propaganda, tetapi sebagai kebenaran komunal yang divalidasi dan absolut (Pariser, 2011). Ruang digital kontemporer mempercepat kategorisasi sosial, membuat individu kehilangan kapasitas mereka untuk evaluasi kritis dan empati terhadap siapa pun di luar wilayah digital mereka.

Dampak Sosiologis: Degradasi Kohesi Sosial dan Keadilan Elektoral

Operasionalisasi *buzzer* politik meninggalkan implikasi yang sangat merusak dan berwujud pada kehidupan komunal di luar dunia maya. Temuan menunjukkan bahwa rekayasa ini secara sistematis mendorong kebangkitan kembali konflik identitas laten dan membongkar prinsip-prinsip dasar demokrasi. Untuk mengukur volume besar dari ancaman ini, data resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat eskalasi kerusakan digital yang masif. Selama periode pemantauan dari Juli 2023 hingga Maret 2024 menjelang pemilihan umum, ditemukan sebanyak 274 klaster isu hoaks politik yang mengkhawatirkan, yang direplikasi dan menyebar menjadi 3.235 konten yang sangat merusak di ruang publik digital. Penggunaan narasi primordial dan kampanye hitam memiliki implikasi langsung yang membawa bencana bagi runtuhnya kohesi sosial. Kembali pada teori sosiologis Durkheim dan Putnam, ketahanan masyarakat yang sejati bergantung pada modal sosial yang menjembatani, yaitu kepercayaan inklusif yang merekatkan kelompok-kelompok yang heterogen dan lintas budaya secara bersama-sama. Sebaliknya, *buzzer* menyuntikkan bentuk beracun dari modal sosial yang mengikat yang melahirkan eksklusivitas dan membunuh empati antarkelompok. Stereotip yang dimanipulasi dan diputar ulang jutaan kali melalui amplifikasi algoritmik pada akhirnya mengkristal menjadi memori kolektif yang terdistorsi (Rahmawati & Neviyarni, 2024). Analisis ketat menegaskan bahwa hasil akhirnya adalah terputusnya harmoni masyarakat pada tingkat organik; hubungan ketetanggaan, persahabatan seumur hidup, dan bahkan ikatan keluarga secara tragis terfragmentasi oleh sentimen politik yang intens yang diwarisi dari provokasi siber buatan (Sarjito, 2024).

Selain itu, *buzzer* secara inheren menghancurkan konsep Keadilan Elektoral. Demokrasi, berdasarkan definisinya sendiri, menuntut proses partisipasi yang tulus, otentik, dan jujur. Kehadiran *buzzer* yang memanipulasi opini melalui perilaku tidak otentik yang terkoordinasi, bersembunyi di balik profil anonim, dan memanfaatkan uang gelap secara langsung melanggar hak konstitusional warga negara untuk menerima informasi yang benar. Pemilihan umum yang dimenangkan melalui manipulasi algoritmik dan penipuan kognitif

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

menderita defisit legitimasi yang parah, menabur benih ketidakpercayaan publik jangka panjang terhadap institusi negara.

Ancaman Keamanan Lunak dan Sabotase Ketahanan Nasional

Di luar politik elektoral, ancaman disinformasi yang didorong oleh *buzzer* menimbulkan "ancaman keamanan lunak" yang parah yang menyabotase prinsip-prinsip integrasi nasional dan ketahanan negara selama krisis multidimensi. Penyebaran hoaks bukan sekadar masalah hubungan masyarakat; hal itu secara langsung mengganggu kapasitas negara untuk mengatur dan memelihara ketertiban umum. Di sektor ketahanan kesehatan masyarakat, rekayasa hoaks sistematis yang dibangun oleh *buzzer* dan aktor oportunis berhasil menghancurkan solidaritas publik. Contoh utamanya adalah infodemik COVID-19, di mana ribuan hoaks—termasuk teori konspirasi rekayasa tentang mikrocip di dalam vaksin, sangat merusak kepercayaan publik terhadap otoritas medis dan menghambat upaya pemulihan nasional. Sementara itu, di sektor stabilitas ekonomi, sirkulasi disinformasi yang terkoordinasi dapat mengganggu pasar keuangan. Penyebaran rumor palsu terkait pencabutan mendadak subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Agustus 2022 berhasil memicu pembelian panik massal oleh publik, antrean panjang di pom bensin, dan gesekan horizontal dalam masyarakat. Kejadian-kejadian ini membuktikan bahwa *buzzer* memanfaatkan kerentanan nasional, memprioritaskan penciptaan kekacauan dan keterlibatan di atas keselamatan dan keamanan populasi.

Strategi Mitigasi dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk membongkar ancaman yang ditimbulkan oleh *buzzer* politik secara sistematis, strategi mitigasi multidimensi harus diimplementasikan, mencakup pendidikan, tata kelola teknologi, dan hukum siber:

Integrasi Literasi Digital Komprehensif: Institusi pendidikan harus secara formal mengadopsi kerangka Literasi Media dan Informasi (MIL) UNESCO ke dalam kurikulum nasional. Ini melampaui pengajaran penggunaan internet dasar; ini membutuhkan pengajaran kesadaran algoritmik, evaluasi kritis terhadap sumber, dan etika nilai-nilai komunikatif kepada siswa untuk melawan manipulasi emosional dari ruang gema.

Tata Kelola Platform dan "Gesekan Reflektif": Pemerintah harus mengatur perusahaan media sosial multinasional untuk mendesain ulang antarmuka/pengalaman pengguna (UI/UX) mereka. Platform harus menerapkan "Gesekan Reflektif", sebuah penundaan algoritmik wajib atau mekanisme peringatan *pop-up* yang memaksa pengguna untuk berhenti sejenak dan merenung secara kritis selama beberapa detik sebelum mereka diizinkan untuk membagikan atau menyebarkan ulang konten politik yang sangat emosional dan belum diverifikasi.

Hukum Siber yang Ketat dan Peraturan Transparansi: Penerapan UU ITE saat ini sangat tidak efektif terhadap *buzzer* karena ketergantungannya pada delik aduan dan anonimitas pelakunya. Indonesia sangat membutuhkan Undang-Undang Perlindungan Siber Elektoral khusus yang mengamanatkan transparansi mutlak dalam pendanaan iklan politik, melarang penggunaan jaringan bot otomatis untuk amplifikasi politik, dan mengadopsi tindakan perlindungan data yang ketat yang terinspirasi oleh GDPR Uni Eropa untuk mencegah penargetan mikro psikologis pemilih.

SIMPULAN

Studi ini menyimpulkan secara tegas bahwa mekanisme operasional *buzzer* politik, yang dirancang dengan cermat melalui eksploitasi sistem algoritmik, mobilisasi akun bot artifisial, dan penetrasi agresif dari disinformasi berbasis sentimen primordial, secara langsung menyebabkan dan secara drastis memperburuk polarisasi sosial di masyarakat majemuk Indonesia. Berfungsi sebagai industri ekonomi politik gelap, intervensi sistematis ini pada dasarnya merusak dinamika hubungan antarkelompok dengan memanipulasi bias kognitif manusia di dalam ruang gema yang terisolasi. Hal ini pada akhirnya memicu

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

permusuhan ekstrem yang tidak berdasar dan polarisasi afektif antara faksi *in-group* dan *out-group*. Kehancuran tragis dari wilayah moderat abu-abu dan pembungkaman paksa terhadap warga rasional akibat narasi kebencian yang terus dikuatkan memiliki implikasi sosiologis yang fatal. Ini berujung langsung pada runtuhnya modal sosial yang menjembatani dan kematian perlahan dari kohesi masyarakat organik di dunia nyata. Dengan demikian, *buzzer* politik secara empiris terbukti tidak hanya mendelegitimasi prinsip-prinsip dasar keadilan dan keaslian dalam kontestasi elektoral tetapi juga berubah menjadi agen yang sangat berbahaya yang menghancurkan ketahanan nasional, mengganggu ketertiban umum, dan mengancam keharmonisan komunal lintas identitas. Untuk membendung ancaman struktural yang mendalam ini, pendekatan interdisipliner yang progresif sangat mendesak diperlukan. Ini mencakup integrasi holistik kurikulum literasi digital kritis di institusi pendidikan, pembentukan instrumen hukum siber yang ketat dan transparan, dan penegakan peraturan tata kelola platform tanpa kompromi, seperti gesekan reflektif, yang memprioritaskan keselamatan psikologis dan integritas demokratis masyarakat di atas keterlibatan platform komersial.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. R. (2020). When the Truth Is Decided by Media Buzzers: The Case of Power Balance. *Jurnal Komunikasi Indonesia, 8*(3).

Arianto, B. (2020). Salah kaprah ihwal buzzer: Analisis percakapan warganet di media sosial. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5*(1), 1-20. https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7287

David. (2017). Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015. *Jurnal Wacana Politik, 2*(1), 54.

Estyani Cahya, D., & Nasiwan, N. (2024). Tipologi Partisipasi Politik Generasi Z ditinjau dari Pendidikan Politik Melalui PPKn dan Akses Media Sosial. *Jurnal Sosial Teknologi, 4*(12), 1053–1063.

Hasrul, Hamzah, H., & Apriani, R. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Buzzer Penyebab Berita Bohong Dan Fitnah Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(6), 10410–10420. https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2771

Indranata, F., & Alhamdi, R. (2024). Pengaruh Medsos terhadap pembentukan Polarisasi Netizen Jelang Pilpres 2024. *Samudra Biru*.

Juditha, C. (2019). Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika*, 199-212.

Mustika, R. (2019). Pergeseran Peran Buzzer Ke Dunia Politik Di Media Sosial. *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi, 2*(2), 144–151. https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.60

Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. Penguin Press.

Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.

Rahmawati, A. I., & Neviyarni, S. (2024). Teori Identitas Sosial, Stereotipe, dan Prasangka dalam Fenomena Kontemporer. *TSAQOFAH: Jurnal Penelitian Guru Indonesia, 6*(2), 1832-1838. https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v6i2.8668

Rahmawati, et al. (2021). Pemetaan Kategori Disinformasi Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Kementerian Komunikasi dan Informasi*.

Riyanto, A. D. (2024). *Digital 2024 Indonesia*. Datareportal & Hootsuite We Are Social.

Sari, Y., Sunarso, & Suyato. (2025). Literasi Digital Sebagai Fondasi Pendidikan Politik Generasi Muda Era Digital. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 8*(4), 175–184. https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4975

Sarjito, A. (2024). Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 6*(2), 175-186. https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1547

Senora, S. (2025). Peran Pendidikan Politik dalam Membangun Generasi Pemilih Cerdas dan Kritis. *Jurnal Kajian Sosial Dan Humaniora, 1*(3), 131–142.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Setiawan, R., Muqsith, M. A., Avzalova, E., Sulthan, M. F., & Mladenov, S. V. (2022). Political Communication Through New Media In Local Elections In Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9*(1), 1-12.

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of Intergroup Relations* (pp. 7-24). Nelson-Hall.

Trianto, R. (2020). Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media. *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi, 4*(1), 47-66. https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.7250

Yulianto, H. (2023). Fenomena Buzzer dan Perang Siber Jelang Pemilu 2024: Perspektif Netizen Indonesia. *JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1*.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923